

Analisis wacana nilai pendidikan multikultural dalam buku teks Sejarah Indonesia kelas XI sekolah menengah atas kurikulum merdeka

Dwi Wahyu Ningtyas, Dewa Agung Gede Agung*, Moch. Nurfahrul Lukmanul Khakim

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Penulis korespondensi, Surel: dewa.agung.fis@um.ac.id

Paper received: 20-10-2022; revised: 15-11-2022; accepted: 10-12-2022

Abstract

This article aims to describe and analyze the discourse on the value of multicultural education in the Indonesian History textbook for Class XI Senior High School Curriculum Merdeka. This article uses a qualitative approach using the critical discourse analysis method of Norman Fairclough's model. The source of the data in this study was the Indonesian History textbook Independent Curriculum for class XI published by the Center for Curriculum and Books (Kemendikbudristek). Collecting data in this study using documentation study techniques. The way to do this is by collecting qualitative documents, both in the form of public documents and private documents. Then the researcher conducted a text analysis by examining the implied meaning in the textbook. The data analysis technique in this study follows the critical discourse analysis technique of Norman Fairclough's model, which consists of textual analysis of description, interpretation, and explanation. The results obtained from this study, namely the fact that in the Indonesian History textbook for Class XI Senior High School Curriculum Merdeka, the value of multicultural education that most often appears is the responsibility of the world community with multicultural indicators, namely collaborating in social activities regardless of cultural differences. The percentage of multicultural education values that appear in the entire Indonesian History textbook are human values 29 percent, democratic values 28 percent, plurality values 18 percent, divine value 11 percent, justice values 9 percent, and tolerance values 5 percent.

Keywords: multicultural; textbook; Indonesian history

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis wacana nilai pendidikan multikultural dalam buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI Sekolah Menengah Atas Kurikulum Merdeka. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode analisis wacana kritis dari model Norman Fairclough. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku teks Sejarah Indonesia Kurikulum Merdeka untuk kelas XI yang diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Kemendikbudristek). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi. Cara yang dilakukan yakni dengan mengumpulkan dokumen kualitatif, baik berupa dokumen publik maupun dokumen privat. Kemudian peneliti melakukan analisis teks dengan mengkaji makna yang tersirat dalam buku teks. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti teknik analisis wacana kritis model Norman Fairclough, yang terdiri dari analisis teks deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni didapatkan fakta bahwa buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI Sekolah Menengah Atas Kurikulum Merdeka, nilai pendidikan multikultural yang paling sering muncul adalah tanggung jawab masyarakat dunia dengan indikator multikultural yakni bekerjasama dalam kegiatan sosial tanpa memandang perbedaan budaya. Presentase jumlah nilai pendidikan multikultural yang muncul dalam keseluruhan buku teks Sejarah Indonesia nilai kemanusiaan 29 persen, nilai demokratis 28 persen, nilai pluralitas 18 persen, nilai keutuhan 11 persen, nilai keadilan 9 persen, dan nilai toleransi 5 persen.

Kata kunci: multikultural; buku teks; sejarah Indonesia

1. Pendahuluan

Pendidikan sejarah termasuk dalam bagian ilmu sosial yang memiliki peran penting untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa. Mata pelajaran sejarah diberikan bertujuan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki sikap bertanggung jawab dan demokratis. Hugiono dan Poerwanta (Slamet, 2017) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) karakter yang didapat melalui proses pembelajaran sejarah. *Pertama*, secara ontologi, pelajaran sejarah mengenai proses peradaban, penyadaran, dan pemberdayaan nilai bagi peserta didik sebagai warga negara. *Kedua*, secara epistemologi, pelajaran sejarah lebih mengedepankan pendekatan multikultural, yang berkaitan dengan kebhinekaan dan keanekaragaman peserta didik. *Ketiga*, secara aksiologi, tujuan pelajaran sejarah adalah untuk menanamkan rasa tanggung jawab secara pribadi dan sosial kepada peserta didik sebagai bangsa.

Berdasarkan berbagai pendapat tentang pendidikan sejarah, diduga melalui pendidikan sejarah dapat menumbuhkan karakter dan jati diri bangsa yang diperoleh melalui nilai perjuangan di dalam peristiwa sejarah. Selain itu, pendidikan sejarah juga merupakan wadah untuk menumbuhkan sikap yang tercermin dari nilai ideologi luhur, serta sebagai tempat berpikir yang berorientasi pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran sejarah tentunya dibutuhkan alat bantu berlangsungnya proses pembelajaran, alat bantu tersebut yakni buku teks sebagai bahan ajar. Buku teks merupakan bahan ajar yang paling sering bersentuhan langsung dengan peserta didik dan pendidik selama proses pembelajaran.

Buku teks sejarah memiliki peran yang sangat besar untuk menunjang pembelajaran, namun saat ini buku teks sejarah hanya digunakan oleh peserta pada saat tertentu saja. Keberadaan buku teks sejarah hanyalah media untuk mencapai "nilai akhir kognitif" saja. Peserta didik belum tentu dapat memaknai isinya, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang tentang isi dalam buku teks sejarah. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik dapat memahami bahwa isi buku teks sejarah mengandung makna di dalamnya yang diduga salah satunya terdapat makna nilai pendidikan multikultural sebagai bagian dari penguatan jati diri bangsa. Seperti yang telah disampaikan oleh Hugiono dan Poerwanta (Slamet, 2017) bahwa terdapat 3 (tiga) karakter yang dapat diperoleh melalui proses pembelajaran sejarah, salah satu karakternya yakni, pelajaran sejarah yang mengedepankan pendekatan multikultural yang berkaitan dengan kebhinekaan dan keanekaragaman peserta didik.

Tidak dapat kita pungkiri bahwa bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa pluralis di dunia dengan mempunyai keberagaman budaya yang kompleks. Terdapat sekitar kurang lebih 270 juta orang yang tinggal di Indonesia, dan ada ratusan etnis suku, agama, budaya dan adat istiadat dari Sabang sampai Merauke. Pluralitas tersebut terdiri dari berbagai perbedaan baik yang bersifat vertikal atau horizontal. Perbedaan antara lapisan sosial atas dan bawah, baik dari bidang ekonomi, politik dan pendidikan dikenal sebagai perbedaan yang bersifat vertikal. Perbedaan yang bersifat horizontal meliputi perbedaan kesatuan sosial, seperti bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, dan lain sebagainya. Apabila antar etnis dalam kondisi tidak baik dapat menyebabkan munculnya konflik antar etnis (Supriatin, 2017). Oleh karena itu, keberagaman merupakan potensi sekaligus tantangan, yang jika tidak dikelola dengan baik akan berubah menjadi konflik sosial yang bernuansa SARA (Supriatin & Nasution, 2017).

Langkah yang dapat digunakan untuk mengatasi problematika kemajemukan masyarakat salah satunya yakni melalui pendidikan. Pendekatan pendidikan diharapkan menjadi solusi yang dapat meminimalisir konflik dan membangun kesadaran terhadap pentingnya kehidupan sosial yang damai. Maka dari itu pendidikan multikultural sangat penting, tidak terkecuali dalam pendidikan sejarah untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan serta rasa nasionalisme. Menurut Mulyana (2017) dalam *Kapita Selekta Pendidikan Sejarah* menjelaskan bahwa pada buku teks sejarah paling cocok ditampilkan muatan materi multikultural. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya buku teks sejarah dianggap mampu menumbuhkan sikap saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghadirkan peristiwa sejarah sebagai esensi kebinekaan yang bermakna (Supriatin & Nasution, 2017).

Pendidikan multikultural penting dibagikan kepada peserta didik dengan harapan agar peserta didik dapat memahami luasnya keragaman dalam masyarakat, sehingga tercipta keharmonisan dalam bermasyarakat yang majemuk. Keragaman tersebut dapat berpengaruh kepada sikap, tingkah laku dan pola pikir. Muatan yang dapat dimasukkan dalam pendidikan multikultural yakni sikap saling menghormati, toleransi antar individu, mengakui hak setiap individu dan memberikan kebebasan. Prinsip utama atau inti dari pendidikan multikultural yakni persamaan, kesederajatan, dan saling menghormati yang harus diajarkan kepada peserta didik. Pokok-pokok bahasan wacana pendidikan multikultural antara lain: asal-usul bangsa Indonesia, silang budaya, jaringan dagang, integrasi Nusantara, nasionalisme, penguatan jati diri bangsa Indonesia, dan nilai juang revolusi. Diduga bahwa keberagaman ialah bagian dari peristiwa sejarah Indonesia (Winata, 2020).

Menganalisis atau meninjau ulang buku teks, khususnya buku teks sejarah merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kepada peserta didik betapa pentingnya nilai pendidikan multikultural. Hal ini dikarenakan buku teks merupakan buku pedoman yang perlu digunakan di satuan pendidikan dan paling sering berinteraksi langsung dengan peserta didik dan pendidik selama proses pembelajaran. Melalui analisis wacana dapat memberikan penjelasan mengenai gambaran tentang pentingnya nilai pendidikan multikultural yang diduga terdapat di dalam buku teks sejarah. Analisis wacana yaitu upaya penguraian penjelasan tentang makna dari isi sebuah buku teks, iklan, percakapan, wawancara, komentar, atau pidato yang akan atau sedang dikaji dengan memusatkan perhatian pada struktur yang secara alamiah terdapat dalam bahasa lisan maupun tulisan. Bahan yang digunakan untuk analisis wacana pada penelitian ini yakni buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI Sekolah Menengah Atas Kurikulum Merdeka yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Kemdikbudristek.

Buku teks Sejarah Indonesia Kurikulum Merdeka terbitan Kemdikbudristek digunakan peneliti karena Kurikulum Merdeka sendiri merupakan kurikulum terbaru yang dikembangkan Kemdikbudristek untuk memulihkan pembelajaran yang diterapkan pada Sekolah Penggerak selama 2022-2024. Pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia No. 13 tahun 2022 Bab II mengenai Visi, Misi, dan Tujuan Kemdikbudristek menyebutkan bahwa visi Kemdikbudristek yakni untuk mewujudkan Indonesia yang maju dengan tatanan peserta didik Pancasila yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, imajinatif dan berfikir kritis. Misi Kemdikbudristek sendiri salah satunya yakni untuk mewujudkan pelestarian dan pemajuan budaya serta pengembangan bahasa dan sastra, sedangkan tujuan Kemdikbudristek salah satunya yakni pengarusutamaan dalam pendidikan perlu dilakukan dengan pelestarian, pemajuan budaya, bahasa, dan sastra. Mengenai visi, misi, dan tujuan

Kemdikbudristek tersebut diharapkan dapat membentuk peeseta didik Pancasila yang berkebinekaan global dengan mewujudkan dan melestarikan budaya. Mengenai hal tersebut diduga dapat diimplementasikan melalui pendidikan multikultural secara langsung maupun dalam buku teks. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang analisis wacana nilai pendidikan multikultural pada buku teks Sejarah Indonesia Kurikulum Merdeka terbitan Kemdikbudristek. Hal tersebut dikarenakan satuan pendidikan memerlukan buku teks untuk digunakan proses pembelajaran. Maka dari itu, peneliti diharapkan dapat mengungkap muatan pokok-pokok wacana tentang nilai pendidikan multikultural termuat pada buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI SMA Kurikulum Merdeka.

Selain itu, alasan pemilihan buku teks yang dianalisis untuk satuan pendidikan SMA kelas XI karena masih belum banyak buku yang diterbitkan untuk Kurikulum Merdeka. Pada saat penulis melakukan penelitian di laman buku.kemdikbud.go.id, buku teks Sejarah Indonesia Kurikulum Merdeka hanya terdapat dua buku, yakni buku teks Sejarah Indonesia kelas X untuk SMK dan kelas XI untuk SMA, sedangkan kelas XII masih belum diterbitkan. Alasan bukan satuan pendidikan SMK yang dianalisis, karena berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Sekolah Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 menyebutkan bahwa mata pelajaran Sejarah Indonesia SMA jauh lebih lengkap dibandingkan dengan SMK yang hanya mendapatkan mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas X saja.

Analisis wacana kritis memandang bahwa buku teks pelajaran merupakan refleksi dari peninggalan konstelasi kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Fairclough, analisis wacana kritis melihat wacana dari pemakaian bahasa, tulisan dan lisan sebagai bentuk praktik sosial. Van Dijk, Fairclough dan Wodak (Fauzan, 2014) menyampaikan bahwa analisis wacana kritis memasukkan konteks dalam lingkup latar, situasi, historis, kekuasaan dan ideologi. Metode analisis yang digunakan oleh Fairclough tidak jauh berbeda dengan van Dijk, dalam menganalisis hadir juga praktek sosil budaya (*socioculture practice*). Maka dari itu, peneliti memilih analisis wacana kritis pendekatan Fairclough dalam melakukan penelitian, dikarenakan Norman Fairclough berusaha untuk menghubungkan antara tata bahasa dengan konteks sosial yang cocok digunakan untuk mengupas secara kritis wacana nilai pendidikan multikultural dalam buku teks Sejarah Indonesia (Masitoh, 2020).

Berdasarkan pemaparan tersebut maka diambil rumusan masalah yakni bagaimana wacana nilai pendidikan multikultural dalam buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI Sekolah Menengah Atas Kurikulum Merdeka?. Adapun tujuan kajian dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis wacana nilai pendidikan multikultural dalam buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI Sekolah Menengah Atas Kurikulum Merdeka.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Menurut Creswell (2012) kualitatif merupakan metode untuk meksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial bukanlah pendekatan baru dalam disiplin antropologi dan studi-studi humaniora. Pendekatan kualitatif juga relatif lebih dikenal dan diterima oleh disiplin ilmu sosial (Poerwandari, 2011). Pada umumnya pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh data kualitatif yang mengandung makna mendalam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumentasi. Cara yang dilakukan yakni dengan mengumpulkan dokumen kualitatif, baik berupa dokumen publik maupun dokumen privat. Kemudian peneliti melakukan analisis teks, tidak hanya sekadar mencatat isi buku teks, tetapi juga mengkaji makna yang tersirat dalam buku teks. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam model Norman Fairclough, yang terdiri dari analisis teks deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Instrumen penelitian yang digunakan yakni *human instrument* atau peneliti sendiri yang berperan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, penganalisisan, penafsiran, dan pelaporan hasil penelitian (Moleong, 2012). Uji validitas keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan uji reliabilitas yakni derajat konsistensi dari hasil temuan peneliti. Uji reliabilitas terdapat dua macam, yakni *intrarater* dan *interrater*. *Intrarater* dilakukan dengan cara peneliti harus memiliki ketekunan dan kecermatan dalam meneliti data yang tersedia, harus dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan data yang valid. Sedangkan, *interrater* dilakukan dengan teman sejawat dalam menganalisis wacana kritis. Akan tetapi dalam penelitian ini, validitas data menggunakan uji reliabilitas *intrarater* mengingat instrumen penelitian dilakukan oleh peneliti sendiri.

3. Hasil dan Pembahasan

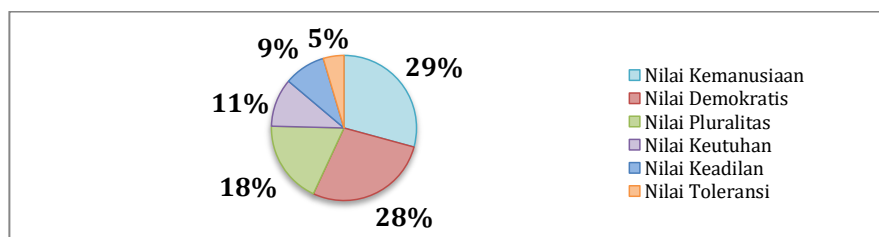
3.1. Kecenderungan Nilai Pendidikan Multikultural yang Muncul dalam Buku Teks Sejarah Indonesia

Hasil analisis wacana kritis pada buku teks SMA Kurikulum Merdeka berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Nilai Pendidikan Multikultural dalam Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XI SMA Kurikulum Merdeka

Nilai Pendidikan Multikultural	Buku Teks Kelas XI BAB				Jumlah
	1	2	3	4	
Toleransi	-	2	1	-	3
Kemanusiaan	3	6	6	4	19
Keutuhan	7	-	-	-	7
Demokratis	7	5	3	3	18
Keadilan	3	3	-	-	6
Pluralitas	4	1	3	4	12
Jumlah	24	17	13	11	65

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa jumlah perbandingan setiap nilai pendidikan multikultural yang muncul berdasarkan presentase sebagai berikut.



Gambar 1. Diagram Pie Presentase Nilai Pendidikan Multikultural dalam Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XI SMA Kurikulum Merdeka

Berdasarkan paparan data hasil analisis model Norman Fairclough yang telah dituliskan. Presentase jumlah nilai pendidikan multikultural yang muncul dalam keseluruhan buku teks Sejarah Indonesia adalah nilai kemanusiaan 29 persen, nilai demokratis 28 persen, nilai pluralitas 18 persen, nilai keutuhan 11 persen, nilai keadilan 9 persen, dan nilai toleransi 5 persen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai kemanusiaan adalah nilai pendidikan multikultural yang sering muncul secara keseluruhan dalam buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI Sekolah Menengah Atas (SMA) Kurikulum Merdeka terbitan Kemendikbudristek. Hal ini dapat dipahami berdasarkan materi yang disajikan dalam buku teks terkait dengan nilai pendidikan multikultural yang terdapat dalam buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI Sekolah Menengah Atas (SMA) Kurikulum Merdeka terbitan Kemendikbudristek yang terdiri dari bab 1, 2, 3, dan 4 memiliki konteks berbeda, seperti berikut.

Nilai pendidikan multikultural yang paling sering muncul adalah nilai kemanusiaan yang terdiri atas dua aspek, yakni humanis dan kesederajatan. Aspek humanis dengan indikator mencintai sesama satu sama lain, bersedia membantu sesama manusia, dan semangat melakukan kegiatan sosial atau kemunusiaan. Aspek kesederajatan dengan indikator persamaan derajat dilihat dari segi agama, suku, ras, gender, dan kelompok manapun, persamaan hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak, serta kewajiban yang sama sebagai individu, masyarakat, dan hamba Tuhan. Nilai kemanusiaan dalam bab 1 berkaitan dengan diberlakukannya kebijakan Politik Etis sejak 17 September 1901, dengan tiga program utama, yakni edukasi, emigrasi, dan irigasi. Sejak saat itu pemerintah kolonial mulai mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dari negara Eropa kepada masyarakat Hindia Belanda baik melalui pengajaran kepada masyarakat maypun melalui pendidikan di sekolah. Selain IPTEK, pemerintah kolonial juga fokus pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat secara luas, selain itu juga menanamkan ilmu kedokteran. Pemerintah juga memberikan fasilitas pendidikan melalui pelatihan bidan atau dukun bayi bagi para tenaga medis dan banyak rakyat pribumi yang terlibat langsung di dalamnya. Memasuki tahun 1919, orang-orang Indo membentuk IEV (Indo Europe Verbond) untuk menuntut kesederajatan. Mereka menuntut hidup orang-orang Indo agar dipermudah dan melawan sikap rasis, sebab mereka terkadang tidak diterima di kalangan manapun baik Belanda atau kalangan pribumi.

Pada bab 2, nilai kemanusiaan tampak pada kehidupan salah satu tokoh India yakni Mohanda Karamchand Gandhi. Gandhi dikenal sebagai seorang yang sangat mengutamakan nilai kemanusiaan menolak semua tindak kekerasan, bahkan pada saat melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Di Indonesia nilai kemanusiaan berkaitan dengan munculnya kesadaran nasionalisme berbangsa, salah satu tokoh nasionalis Indonesia yakni Tirto Adhi Soerjo dengan mendirikan organisasi Sarekat Prijaji pada thun 1906. Organisasi tersebut memberikan beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dengan tujuan untuk memajukan rakyat pribumi. Selain Tirto Adhi Seorjo, tokoh nalionalis Indonesia lainnya yakni Wahidin Sudirohusodo. Wahidin merupakan seorang dokter lulusan STOVIA yang pada tahun 1907 di depan para mahasiswa STOVIA menyuarakan untuk membentuk organisasi agar dapat mengangkat derajat bangsa. Organisasi-organisasi nasional yang dibentuk, tidak terkecuali juga didirikan organisasi perempuan. Organisasi-organisasi perempuan tersebut melaksanakan rapat kongres dengan hasil rapat, antara lain, pernikahan anak dicegah, mendirikan *Studie fonts*, pendidikan kepanduan putri semakin diperkuat, dikirimkan permintaan kepada pemerintah untuk memperhatikan janda serta anak-anak dengan memberi bantuan berupa uang, menolak penarikan tunjangan pensiun, dan memperluas pendirian sekolah-sekolah perempuan. Pada tahun 1912 surat kabar perempuan pertama *Soenting*

Melajoe diterbitkan di Padang, Sumatera Barat. Melihat surat kabar pertama yang diterbitkan oleh perempuan menunjukkan bahwa pemikiran kaum perempuan di Indonesia tidak jauh tertinggal dari kaum pria. Pada saat pandemi influenza di Hindia Belanda, pada tahun 1920 pemerintah kolonial merancang berbagai kebijakan untuk penanggulangan dan pada akhirnya membentuk Influenza Ordonasi. Selain memerangi penyakit, pemerintah juga mengedukasi masyarakat dengan menginformasikan mengenai penyakit yang sedang berkembang di Hindia Belanda.

Pada bab 3, nilai kemanusiaan tampak pada saat menjelang masuknya Jepang ke Indonesia seorang tokoh nasional Indonesia yakni M.H. Thamrin pada tahun 1934 saat sidang *Volksraad* menunjukkan sikap simpatinya kepada Jepang. Hal tersebut dikarenakan para tokoh nasionalis belum mengetahui maksud sesungguhnya dari kedatangan Jepang. Pada saat Jepang berkuasa orang-orang Eropa disingkirkan dari jabatan, sedangkan orang Indonesia dipertahankan dan masyarakat memperjuangkan kesetaraan agar dapat memperoleh kekuasaan menduduki jabatan. Selain itu, sebuah organisasi bernama *Fujinkai* mampu memobilisasi kaum perempuan Indonesia. Melalui organisasi-organisasi perempuan dapat menunjukkan kesetaraan, karena kaum perempuan bukan hanya laki-laki saja yang memiliki kesempatan untuk berorganisasi dan berkegiatan sosial. Usaha para rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan pada masa pemerintahan Jepang, pada akhirnya atas janji Jenderal Koiso dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan pada 1 Maret 1945. Badan penyelidikan tersebut berpusat di Jawa, namun keanggotaannya berasal dari berbagai golongan, bahkan ada tokoh perempuan yang menjadi anggota, yakni Maria Ulfah dan Siti Sukaptinah. Maria Ulfah merupakan tokoh perempuan yang memperjuangkan agar laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Kegigihannya untuk memperjuangkan persamaan kedudukan warga negara membuahkan hasil, sehingga usulannya dituangkan dalam pasal 27 UUD 1945. Tokoh perempuan lainnya yakni Siti Sukaptinah sejak masa kolonial juga gigih dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Indonesia. Ia menyuarakan agar perempuan dapat turut serta dalam berparlemen dan berpolitik.

Pada bab 4, nilai kemanusiaan berkaitan dengan kekalahan Jepang. Pada saat Jepang menyerah, pihak Australia melakukan kegiatan sosial kepada rakyat khususnya di Balikpapan untuk membagikan bantuan berupa makanan yakni nasi, biskuit, kedelai, dan sebagainya. Menjelang kemerdekaan Indonesia, salah satu tokoh Jepang, yakni Laksamana Muda Tadashi Maeda yang merupakan Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat tentara Kaisar Jepang mempersilahkan kepada tokoh nasionalis Indonesia untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dilakukan oleh Maeda karena memiliki rasa simpati kepada perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan dan demi tercapainya kemerdekaan. Pada 18 Agustus 1945 kabar mengenai Indonesia telah merdeka menyebar luas di Mesir. Mendengar kabar tersebut tidak hanya orang-orang Indonesia yang berada di Mesir yang merasakan kebahagiaan, tetapi orang-orang Mesir yang memberitakannya juga penuh dengan rasa simpati atas perjuangan orang Indonesia.

Nilai pendidikan multikultural yang paling sering muncul kedua adalah nilai demokratis yang terdiri atas tiga aspek, yakni mengutamakan kepentingan bersama, mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta kekebaratan. Mengutamakan kepentingan bersama dengan indikator dapat bekerja sama, mengutamakan kepentingan bersama, dan memiliki kesadaran untuk saling membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dengan indikator menghormati pendapat inividu lain, mengutamakan keputusan

bersama melalui musyawarah dan mufakat, tidak memaksakan kehendak dan pendapat individu lain, serta bersikap kritis terhadap setiap masalah. Keekerabatan dengan indikator menunjukkan rasa persaudaraan dan persahabatan dengan berbagai suku, etnis, budaya, dan agama, serta menghayati dan memahami keragaman budaya yang ada.

Pada bab 1, nilai demokratis bermula pada perlawanan dari rakyat Indonesia yang menuntut kebebasan dari para penjajah. Sultan Baabullah memimpin perlawanan di Maluku dengan menyatukan rakyat Maluku untuk mengusir Portugis yang telah lama menguasai dan memonopoli perdagangan. Di Kesultanan Banten, sebagai sultan, Sultan Ageng Tirtayasa bekerja sama dengan saudagar dari bangsa Inggris untuk melawan VOC yang berusaha menggoyahkan politik kekuasaan Kesultanan Banten. Kesultanan Gowa-Tallo yang bersekutu dengan Wajo juga melawan VOC yang sejak 1660 berambisi untuk menguasai wilayah pelabuhan Somba Opu. Di Maluku rakyat pada awal abad ke-19, rakyat mulai melakukan perlawanan terhadap penjajah dan menentang kebijakan Belanda, Thomas Matulesy atau Kapitan Pattimura bersama panglima perang Martha Tiahahu melancarkan serangan. Di Jawa juga terjadi perlawanan terhadap Belanda oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro mendapat banyak dukungan dari berbagai golongan, mulai dari rakyat Yogyakarta, kaum ulama, bahkan pihak istana. Perlawanan yang dilakukan Pangeran Diponegoro merupakan perlawanan paling sulit yang dihadapi oleh Belanda, karena Pangeran Diponegoro menyusun berbagai rencana taktis dan strategis. Selain itu, perlawanan juga terjadi di Sumatra oleh Tuanku Imam Bonjol yang terkenal dengan Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol yang pada saat itu merupakan Kaum Padri berusaha membuat Kaum Adat melihat tipu muslihat yang dilakukan Belanda. Pada akhirnya Kaum Padri dan Kaum Adat bergabung bersama-sama untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Semua perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia merupakan semangat demokratis demi mendapatkan kebebasan dari penjajahan di wilayahnya sendiri.

Pada bab 2, nilai demokratis tampak pada semangat salah satu tokoh India yakni Gandhi. Gandhi menolak bekerja sama dengan negara lain untuk mencapai kemerdekaan India dan terbebas dari kolonialisme, meskipun ia pernah belajar di luar negeri. Di Indonesia sendiri, memasuki abad ke-20 mulai lahir pergerakan nasional, Haji Samanhoei mendirikan Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911. Seiring berjalannya waktu Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam, dengan cita-cita kebebasan, tetap demokratis dan militan untuk menentang ketidakadilan terhadap rakyat bumiputera. Pada tahun 1913 Komite Bumi putera didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dan kawan-kawannya. Tujuan dibentuknya Komite Bumi putera yakni untuk memperjuangkan dibentuknya majelis permusyawaratan agar rakyat Hindia Belanda dapat menyuarakan dan memperjuangkan kebebasan berpendapat. Pada akhirnya tahun 1918 berdiri lembaga perwakilan rakyat Hindia Belanda yang disebut dengan *Volksraad*, lembaga tersebut mempertemukan kaum bumiputera dari berbagai daerah. Hubungan kaum bumiputera ini menumbuhkan perasaan senasib sepenanggungan, sehingga muncul semangat untuk mendapat kebebasan dari kolonialisasi Belanda. Nilai demokratis berkaitan dengan munculnya kesadaran nasionalisme berbangsa, kemudian menumbuhkan semangat untuk terbebas dari kolonialisme menuju cita-cita kemerdekaan. Menjelang tahun 1920 pers bumiputera semakin ramai dengan berita kritik kebijakan Belanda. Surat kabar banyak diterbitkan, antara lain surat kabar *Oetoesan Melajoe* dan *Soera Perempuan* yang membuat rakyat bersemangat memperjuangkan kebebasan dari kolonialisme dengan semboyan kemerdekaan.

Pada bab 3, nilai demokratis tampak pada perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan pemerintahan Jepang. Meskipun melalui jalan atau perlawanan yang berbeda tujuannya tetap sama yakni mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang bebas dari penindasan asing baik dan bentuk perlawanan fisik maupun organisasi, tetapi tujuannya tetap sama yakni mencapai Indonesia yang merdeka dan terbebas dari penindasan bangsa asing. Usaha para rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan pada masa pemerintahan Jepang, pada akhirnya atas janji Jenderal Koiso dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan pada 1 Maret 1945. Badan tersebut berpusat di Jawa, termasuk kelompok nasionalis dan agama, peranakan Arab dan Cina, Indo, bangsawan, jurnalis dan lain sebagainya. Sidang pertama BPUPK terdapat empat usulan dasar negara yang berbeda dari tokoh nasionalis, yakni Muh. Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Supomo, dan Sukarno.

Pada bab 4, nilai demokratis tampak pada menjelang kemerdekaan Indonesia, terdapat golongan tua dan golongan muda yang berbeda pendapat. Golongan muda menuntut untuk segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan, sedangkan golongan tua meminta untuk tidak terburu-buru dan menunggu keputusan dari PPKI. Akan tetapi, tujuan sebenarnya dari kedua golongan tersebut sama, yakni untuk kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia mengetahui tentang persetujuan *Atlantic Center* oleh pihak Sekutu yang menyebutkan bahwa bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Hal inilah yang membuat para pemuda dan rakyat Indonesia ingin menarik perhatian serta menunjukkan pada Sekutu dan dunia Internasional bahwa bangsa Indonesia memiliki semangat memperjuangkan kebebasan dan mampu menentukan nasib sendiri. Pada 18 Agustus 1945 berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah menyebar luas di Australia. Orang-orang Indonesia yang bekerja sebagai buruh kaap Belanda di Australia bahagia mendengar kabar kemerdekaan dan melakukan mogok kerja untuk memperjuangkan hak bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka dan terbebas dari kolonialisme.

Berkenaan dengan nilai pluralitas dengan aspek rasionalitas antarbudaya, meliputi indikator mengakui, memahami, dan menghargai semua budaya yang ada baik budaya sendiri ataupun budaya individu lain. Pada bab 1, nilai pluralitas bermula dari sejak abad II Masehi, Nusantara telah memiliki hubungan pelayaran dengan India, Cina, dan Timur Tengah. Seorang utusan Raja Bian dari Kerajaan Jawa yang dikenal Yediao diceritakan telah melakukan perjalanan ke Cina pada tahun 131 untuk mempersembahkan upeti dan membangun hubungan jalur kemaritiman. Pada tahun 1405 M berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung Malaya atau tepi Selat Malaka. Raja sekaligus pendiri kerajaan, yakni Parameswara. Ketika Parameswara masuk Islam dan namanya berubah menjadi Iskandar Syah, Bandar Malaka semakin ramai didatangi para pedagang Muslim dari India, Timur Tengah, dan para pedagang Muslim Nusantara sendiri. Pada yang berjudul *Suma Oriental que trata do Mar Roxo ate aos Chins* (Ikhtisar Wilayah Timur dari Laut Merah hingga negeri Cina), seorang pengelana bernama Tome Pires menggambarkan perjalanannya ke Malaka, Jawa, dan Sumatera antara tahun 1512 hingga 1515. Tome Pires mendapati bahwa orang-orang asli Nusantara menjalin hubungan interaksi yang intens dengan bangsa asing, seperti komunitas Tionghoa, bangsa Arab, Persia, Gujarat, Bengal, dan Melayu. Berdasarkan peristiwa sejarah yang telah terjadi di Nusantara, menunjukkan bahwa Nusantara juga merupakan *Melting Pot* dimana terdapat suku, agama, ideologi dari berbagai negara berinteraksi satu sama lain di suatu wilayah. Pada bab 2, nilai pluralitas tampak saat awal abad ke-20 yang merupakan awal dari perkembangan organisasi politik, salah satu organisasi pergerakan nasional yakni Indische Partij (IP). Ideologi IP adalah untuk memperoleh kemerdekaan bagi tanah Hindia. Anggota IP beranggapan bahwa

tanah Hindia sebagai rumah bagi semua golongan penduduk yang ada seperti masyarakat bumiputera, orang Indo, Tionghoa, dan sebagainya.

Pada bab 3, nilai pluralitas tampak pada saat menjelang masuknya Jepang ke Indonesia seorang tokoh nasional Indonesia M.H. Thamrin pada tahun 1934 saat sidang *Volksraad* menunjukkan sikap simpatinya kepada Jepang. Hal tersebut dikarenakan para tokoh nasionalis belum mengetahui maksud sesungguhnya dari kedatangan Jepang. Usaha para rakyat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan pada masa pemerintahan Jepang, pada akhirnya atas janji Jenderal Koiso dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan pada 1 Maret 1945. Badan tersebut berpusat di Jawa, namun keanggotaannya berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, termasuk kelompok nasionalis dan agama, peranakan Arab dan Cina, Indo, bangsawan, jurnalis dan lain sebagainya. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dibentuk setelah BPUPK dibubarkan. Keanggotaan PPKI lebih sedikit dibandingkan BPUPK, akan tetapi tetap terdiri dari perwakilan berbagai golongan, salah satunya yakni Yan Tjwan Bing. Yan Tjwan Bing merupakan seorang politikus keturunan Tionghoa-Indonesia yang aktif pada masa kemerdekaan Indonesia. Pada bab 4, nilai pluralitas tampak ketika dibentuknya PPKI pada 7 Agustus 1945 saat Jepang sudah berada di ujung kekalahan. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk sesuai dengan keputusan Jenderal Besar Terauchi, dengan anggota PPKI yang terdiri atas perwakilan dari berbagai latar belakang kelompok yang berasal dari wilayah di Indonesia.

Berkenaan dengan nilai keutuhan dengan aspek keutuhan bangsa, meliputi indikator, yakni kebersamaan, dapat kerja sama, mencintai tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, dan meningkatkan hubungan kemanusiaan sebagai makhluk sosial. Pada bab 1, nilai keutuhan bermula pada bermula pada perlawanan dari rakyat Indonesia yang menuntut kebebasan dari para penjajah. Sultan Baabullah memimpin perlawanan di Maluku dengan menyatukan rakyat Maluku untuk mengusir Portugis yang telah lama menguasai dan memonopoli perdagangan. Di Kesultanan Banten, sebagai sultan, Sultan Ageng Tirtayasa bekerja sama dengan saudagar dari bangsa Inggris untuk melawan VOC yang berusaha menggoyahkan politik kekuasaan Kesultanan Banten. Kesultanan Gowa-Tallo yang bersekutu dengan Wajo juga melawan VOC yang sejak 1660 berambisi untuk menguasai wilayah pelabuhan Somba Opu. Di Maluku rakyat pada awal abad ke-19, rakyat mulai melakukan perlawanan terhadap penjajah dan menentang kebijakan Belanda, Thomas Matulesy atau Kapitan Pattimura bersama panglima perang Martha Tiahahu melancarkan serangan. Di Jawa juga terjadi perlawanan terhadap Belanda oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro mendapat banyak dukungan dari berbagai golongan, mulai dari rakyat Yogyakarta, kaum ulama, bahkan pihak istana. Perlawanan yang dilakukan Pangeran Diponegoro merupakan perlawanan paling sulit yang dihadapi oleh Belanda, karena Pangeran Diponegoro menyusun berbagai rencana taktis dan strategis. Selain itu, perlawanan juga terjadi di Sumatra oleh Tuanku Imam Bonjol yang terkenal dengan Perang Padri. Tuanku Imam Bonjol yang pada saat itu merupakan Kaum Padri berusaha membuat Kaum Adat melihat tipu muslihat yang dilakukan Belanda. Pada akhirnya Kaum Padri dan Kaum Adat bergabung bersama-sama untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda. Semua perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia demi untuk keutuhan bangsa dan negara.

Berkenaan dengan nilai keadilan yang terdiri dua aspek, yakni menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, serta anti diskriminasi dan anti marginalisasi. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dengan indikator menghormati hak individu lain, memprioritaskan kewajiban

seperti mematuhi aturan, tidak main-main dengan hukum, menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, serta kepedulian terhadap pentingnya stabilitas nasional. Anti diskriminasi dan anti marginalisasi dengan indikator anti terhadap subordinasi, mengakui adanya potensi yang sama untuk mengekspresikan sesuatu, dan semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam pelayanan publik. Pada bab 1, nilai keadilan tampak pada Perjanjian Tordesillas yang dilaksanakan pada 7 Juni 1494. Perjanjian tersebut merupakan titik akhir dari persengketaan wilayah sekaligus titik awal ekspansi wilayah yang dilakukan Portugis dan Spanyol. Paus Paulus Alexander VI membagi garis demarkasi wilayah kekuasaan antara Portugis yang memiliki otoritas di daerah timur dan Spanyol di daerah barat. Pembagian wilayah yang sama dan adil tersebut dilakukan agar tidak terjadi perebutan wilayah. Pada masa kolonialisme di Indonesia nilai keadilan tampak pada tahun 1870 ketika Engelbertus de Waal selaku Menteri Jajahan di Hindia Belanda memberlakukan kebijakan Hukum Agraria atau UU Agraria. Hukum administrasi pertanahan dalam UU Agraria menjadi landasan untuk pemerintah mengatur bagaimana membagi penguasaan tanah terhadap masyarakat pribumi maupun nonpribumi. Memasuki tahun 1919, orang-orang Indo membentuk IEV (Indo Europe Verbond) untuk menuntut keadilan agar kehidupan mereka dipermudah dan melawan sikap rasis. Hal ini dikarenakan mereka terkadang tidak oleh penduduk pribumi dan tidak diterima di lingkungan berdarah Belanda.

Pada bab 2, nilai keadilan tampak saat memasuki abad ke-20 mulai lahir pergerakan nasional, Haji Samanhoe di mendirikan Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911. Seiring berjalannya waktu Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam, dengan cita-cita kebebasan, tetap demokratis dan militan untuk menentang ketidakadilan terhadap rakyat bumiputera. Pada tahun 1918 berdiri lembaga perwakilan rakyat Hindia Belanda yang disebut dengan *Volksraad*, lembaga tersebut mempertemukan kaum bumiputera dari berbagai daerah. Hubungan kaum bumiputera ini menumbuhkan perasaan senasib sepenanggungan, sehingga muncul semangat untuk mendapat keadilan dari tindak diskriminasi pihak Belanda. Sejak awal abad ke-20, Douwes Dekker yang merupakan seorang Indo yang menentang kebijakan diskriminasi rasial dalam masyarakat kolonial. Selain itu, Tjipto Mangunkusumo juga melayangkan kritik terhadap pemerintah kolonial atas terjadinya kemiskinan di kehidupan masyarakat Hindia Belanda dan mengalami eksploitasi yang berlebihan.

Berkenaan dengan nilai toleransi yang terdiri dua aspek, yakni ketakwaan dan toleransi. Aspek ketakwaan dengan indikator keimanan, merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan keyakinan dan keyakinan individu terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta ketaatan yang merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan ketundukan dan kepatuhan dalam menjalankan perintah dan menghindari larangan agama. Aspek toleransi dengan indikator tenggang rasa, pola pikir yang menghargai pilihan dan cara beribadah individu lain menurut agamanya, serta memiliki sikap sadar diri dalam memahami, menghargai, dan mengamalkan agama yang diyakini atau agama yang dianut individu lain.

Pada bab 2, nilai toleransi tampak pada kehidupan salah satu tokoh India yakni Mohanda Karamchand Gandhi. Keluarga Gandhi pemeluk Hindu yang taat dari Kasta Bania yang termasuk dalam kelas elit. Gandhi sangat mengutamakan kemanusiaan tanpa kekerasan, toleransi beragama, dan memiliki gaya hidup yang sederhana. Di Indonesia sendiri, memasuki abad ke-20 mulai lahir pergerakan nasional yang banyak didirikan organisasi, tidak terkecuali organisasi perempuan. Organisasi-organisasi perempuan tersebut membentuk perhimpunan dengan menekankan pentingnya persatuan untuk mencegah perpecahan dengan alasan

apapun termasuk masalah agama. Pada bab 3, nilai toleransi tampak pada saat masa pemerintahan Jepang, untuk menarik perhatian bangsa Indonesia pemerintah Jepang melibatkan urusan agama. Pemerintah Jepang bahkan mendatangkan orang-orang Jepang atau keturunan Jepang yang memiliki kesamaan agama dengan masyarakat setempat, seperti Haji Umar Faisal yang beragama Islam, Pendeta Miahira yang beragama Protestan, dan Alaysius Ogihara yang beragama Katolik.

3.2. Keterkaitan Nilai Pendidikan Multikultural dalam Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XI SMA dengan Kebijakan Kurikulum Pemerintah

Isu mengenai adanya pendidikan multikultural bukanlah hal yang baru, sejak tahun 2003 seperti yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan memiliki peran besar dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul disebabkan keberagaman dan kemajemukan bangsa. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga bertujuan untuk melestarikan warisan budaya Indonesia sebagai identitas nasional dan sebagai jati diri bangsa serta menjamin persatuan NKRI. Pada Pasal 4 butir a sampai e disebutkan tujuan dari pemajuan kekayaan antara lain, 1) mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, 2) meningkatkan keragaman budaya dan sosial, 3) memperteguh jati diri bangsa, 4) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dan 5) mencerdaskan kehidupan bangsa (Syahrman & Mulyana, 2021; Rosada, 2019).

Mengenai paparan di atas tentang UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan semuanya dapat di implementasikan melalui pendidikan multikultural dalam buku teks untuk mendukung pembelajaran secara langsung. Buku teks yang digunakan untuk mendukung pembelajaran, salah satunya yakni pembelajaran sejarah. Seperti yang telah disampaikan oleh Hugiono dan Poerwanta (dalam Slamet 2017) bahwa terdapat 3 (tiga) karakter yang dapat diperoleh melalui proses pembelajaran sejarah, salah satu karakternya yakni, pelajaran sejarah yang mengedepankan pendekatan multikultural. Hal ini berkaitan dengan realitas keanekaragaman potensi peserta didik. Sesuai dengan pernyataan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (dalam Napitupulu, 2013) menyatakan bahwa karakter dalam buku teks dapat digunakan untuk membangun nilai pendidikan multikultural dan meningkatkan kesadaran terhadap keragaman Indonesia.

Pendidikan multikultural menjadi rancangan pemerintah dalam mempersiapkan generasi untuk pembenahan moral bangsa Indonesia, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022, pada Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Kemendikbudristek tahun 2020-2024 yakni:

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Pada pemaparan Kemdikbudristek tahun 2020-2024 di atas, Kemdikbudristek mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dengan membentuk pelajar Pancasila salah satunya yang berkebinekaan global. Berkebinekaan global sendiri merupakan sikap toleransi atau menghormati keberagaman yang ada seperti budaya, suku, etnis, gender, maupun agama. Misi Kemdikbudristek sendiri

salah satunya yakni untuk mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra, sedangkan tujuan Kemdikbudristek salah satunya yakni pelestarian dan pemajuan budaya serta pengarusutamannya dalam pendidikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengasimilasi nilai pendidikan multikultural dalam buku teks yang diajarkan di sekolah, termasuk dalam buku teks Sejarah Indonesia. Penulisan buku teks Sejarah Indonesia untuk Kelas XI Sekolah Menengah Atas tidak lepas dari subyektifitas penulis, kebijakan, atau aturan yang ada. Selain itu, penulisan buku juga harus mengikuti BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan). Kebijakan pemerintah mengenai pendidikan di Indonesia khususnya dalam bentuk kurikulum merupakan rambu-rambu yang harus diikuti ketika menulis buku teks, khususnya buku teks sejarah.

Kurikulum dimaksudkan untuk membantu memperkuat keindonesiaan sebagai negara multikultural, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 Pasal 40 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa.

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang Pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan: a. peningkatan iman dan takwa; b. nilai Pancasila; c. peningkatan akhlak mulia; d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat Peserta Didik; e. keragaman potensi daerah dan lingkungan; f. tuntutan pembangunan daerah dan nasional; g. tuntutan dunia kerja; h. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; i. agama; j. dinamika perkembangan global; dan k. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Pada Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2022 Pasal 40 tentang Standar Nasional Pendidikan di atas menjelaskan bahwa dalam kerangka NKRI, kurikulum diselenggarakan menurut jenjang pendidikan dengan memperhatikan salah satunya, yakni keragaman potensi daerah dan lingkungan. Pada penelitian ini kurikulum yang digunakan yakni Kurikulum Merdeka. Kemdikbudristek mengeluarkan kebijakan pengembangan Kurikulum Merdeka sebagai opsi untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024 yang dimulai pada tahun 2021 dengan kurikulum yang diterapkan pada Sekolah Penggerak (Kemdikbudristek). Berdasarkan pemaparan di atas, nilai pendidikan multikultural merupakan salah satu kunci yang dapat digunakan sebagai langkah untuk mengatasi problematika kemajemukan atau keragaman masyarakat, potensi, dan lingkungan. Keterkaitan antara nilai pendidikan multikultural dalam buku teks Sejarah Indonesia dengan kebijakan pemerintah bisa tercapai apabila setiap individu terutama pendidik dan peserta didik memiliki kesadaran dalam dunia pendidikan.

3.3. Strategi Pendidikan Multikultural dalam Buku Teks Sejarah Indonesia Kelas XI SMA Kurikulum Merdeka

Pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan dengan membimbing atau membentuk peserta didik agar terbiasa hidup di tengah perbedaan yang kompleks, mulai dari perbedaan sosial, ekonomi, budaya, agama, ideologi maupun perbedaan lainnya. Menurut Liliwer (Suryana, 2019) menyebutkan bahwa pendidikan multikultural dapat disebut sebagai strategi dengan memanfaatkan keberagaman latar belakang peserta didik untuk membentuk sikap multikultural. Pendidikan multikultural melalui buku teks ataupun diterapkan secara langsung di dalam kelas dapat membantu peserta didik menghargai perbedaan latar belakang dari individu lain. Maka dari itu, pendidik harus memiliki strategi untuk mengajak peserta didik agar dapat menghargai dan melihat nilai budaya lain yang ada. Strategi pembelajaran multikultural sangat penting bagi sekolah sebagai lembaga pendidikan untuk membentuk

pemahaman bersama tentang konsep budaya, perbedaan budaya, keseimbangan, dan demokrasi.

Pendekatan demokratis adalah salah satu strategi yang dapat digunakan oleh pendidik dengan latar belakang peserta didik yang beragam di dalam kelas. Pendekatan demokratis tersebut pendidik dan peserta didik diberikan hak dan kewajiban yang sama. Dalam pendidikan multikultural, pendidikan demokratis memerlukan kompetensi untuk pendidik. Kompetensi multikultural yang harus dimiliki pendidik, antara lain: pendidik harus siap menerima perbedaan disiplin ilmu, latar belakang, ras, dan etnis para peserta didik, memfasilitasi peserta didik pedatang baru yang minoritas, sensitif terhadap kemungkinan adanya materi pelajaran yang kontroversi, sehingga diperlukan analisis terlebih dahulu sebelum menyampaikan materi, dan menggunakan teknik pembelajaran kelompok untuk mempersatukan perbedaan antar peserta didik (Suryana, 2019). Pengelolaan pembelajaran multikultural melalui beberapa tahap kegiatan, antara lain: kegiatan pendahuluan, dengan menciptakan lingkungan di mana peserta didik dapat belajar dengan harmonis dalam kebersamaan. Kegiatan utama, pendidik dapat membina pembelajaran yang harmonis dalam rangka membentuk kepribadian peserta didik dan menumbuhkan toleransi berdasarkan latar belakang budaya dan keragaman budaya. Tahap analisis, dilakukan untuk mengajarkan peserta didik mampu mengekspresikan sesuatu secara objektif dari isi buku teks pelajaran. Analisis dalam pendidikan multikultural memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara tentang apa yang telah dipelajari dan apa yang mereka ketahui. Peserta didik juga dapat mempraktikkan toleransi dan rasa hormat terhadap sudut pandang individu lain ketika mendiskusikan materi pelajaran, meningkatkan keberanian, dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Abstraksi, , pendidik menggunakan abstraksi untuk memudahkan peserta didik memahami dasar-dasar materi yang dipelajari. Penerapan, peserta didik diberi tugas untuk membuat catatan tentang berbagai materi multikultural dengan maksud untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sosial sebagai bagian upaya pendidik untuk menerapkan pendidikan multikultural. Selain itu, membentuk kelompok belajar dengan peserta didik dari dengan latar belakang sosial beragam untuk dapat saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Kegiatan penutup, dilakukan dengan mengevaluasi pengalaman yang didapat selama proses belajar mengajar, kemudian mengadakan penilaian (Suryana, 2019) .

Pendidik juga dapat memanfaatkan berbagai strategi pembelajaran, misalnya melalui dialog, pendidik dapat mendiskusikan materi yang ada di dalam buku teks apabila terdapat hubungan dengan keanekaragaman budaya, suku, etnis, dan agama yang dapat hidup bersama dalam suatu wilayah. Selain itu, melalui simulasi dan bermain peran, dalam proses pembelajaran peserta didik difasilitasi oleh pendidik untuk memerankan sebagai orang-orang yang berasal dari budaya, etnis, suku atau agama tertentu sesuai dengan materi yang diajarkan. Pada materi-materi tertentu juga dapat diadakan proyek bersama dengan melibatkan keanekaragaman latar belakang dari peserta didik. Melalui pendidikan multikultural peserta didik dapat menumbuhkan sikap toleran, simpatik, dan empatik, serta dapat mempraktikkan nilai pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.

Menurut Bu Indah Wahyu Puji Utami selaku salah satu penulis buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI SMA Kurikulum Merdeka saat wawancara pada 15 September 2022 menyebutkan bahwa “nilai keragaman atau nilai multikultural sangat penting disajikan dalam buku teks khususnya buku teks Sejarah Indonesia, tetapi hal tersebut juga termasuk salah satu

tantangan yang harus dihadapi. Salah satu contohnya, yakni tidak menjadikan materi pada buku teks hanya berisi Jawa sentris, harus memasukkan unsur-unsur dari daerah yang lain". Penting untuk menyajikan pengetahuan-pengetahuan lokal dari berbagai wilayah di Indonesia dalam buku teks Sejarah Indonesia. Contoh usaha yang menunjukkan agar di dalam buku teks tidak Jawa sentris, yakni salah satu bab dari materi di buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI SMA Kurikulum Merdeka, menyebutkan arah mata angin (utara, selatan, timur, dan barat) ada yang berasal dari daerah Bugis, Borneo, dan lain sebagainya. Kemudian, terdapat materi mengenai Maria Ulfah (bekerja di Departemen Kehakiman selama masa pemerintahan Jepang) dan Siti Sukaptinah (berasal dari *Fujinkai*), hal tersebut dilakukan penulis buku agar tidak menyajikan dari satu kelompok atau golongan tertentu saja. Selain itu, dalam penulisan buku teks penulis juga berusaha untuk memasukkan tentang perempuan (kemanusiaan dan keadilan), berusaha untuk mengakomodasi berbagai hal mengenai kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Pada bab 3 mengenai masa pemerintahan Jepang dalam buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI SMA Kurikulum Merdeka juga menyebutkan pembagian tugas yang dibagi menjadi tiga wilayah berbeda pemerintahan militer Jepang di Indonesia, meliputi Sumatera, Jawa-Madura, dan Kalimantan-Sulawesi-Maluku. Selain itu, pada saat dibentuknya BPUPK keanggotaannya juga bukan hanya dari golongan bangsa bumiputera saja, tetapi ada orang-orang dari keturunan bangsa lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa yang tinggal di Indonesia bukan hanya bangsa bumiputera saja pada saat itu, ada orang Indo, Cina, Arab, dan lain sebagainya. Berdasarkan beberapa contoh materi di atas merupakan usaha dari penulis untuk menyajikan nilai keragaman atau nilai multikultural dalam buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI SMA Kurikulum Merdeka. Bisa disimpulkan bahwa terdapat wacana nilai pendidikan multikultural dalam buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI Sekolah Menengah Atas (SMA) Kurikulum Merdeka.

4. Simpulan

Penelitian ini berfokus pada mendeskripsikan nilai pendidikan multikultural dalam buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI Sekolah Menengah Atas (SMA) Kurikulum Merdeka. Berdasarkan penelitian ini, didapatkan fakta bahwa buku teks Sejarah Indonesia Kelas XI Sekolah Menengah Atas (SMA) Kurikulum Merdeka terbitan Kemdikbudristek terdapat nilai-nilai pendidikan multikultural yakni nilai toleransi, nilai kemanusiaan, nilai demokratis, nilai keutuhan, nilai keadilan, dan nilai pluralitas. Nilai pendidikan multikultural yang paling sering muncul adalah nilai kemanusiaan, dengan indikator multikultural yakni mencintai sesama manusia, sikap saling tolong menolong, suka melakukan kegiatan sosial serta kemanusiaan, menghargai persamaan derajat baik dilihat dari agama, suku, budaya, ras, gender, dan golongan, persamaan hak atas pendidikan, pekerjaan, kehidupan yang layak, dan kewajiban sebagai individu, anggota masyarakat, dan hamba Tuhan. Nilai kemanusiaan paling banyak muncul dengan jumlah 19 kali, nilai demokratis muncul dengan jumlah 18 kali, nilai pluralitas muncul dengan jumlah 12 kali, nilai keutuhan muncul dengan jumlah 7 kali, nilai keadilan muncul dengan jumlah 6 kali, dan nilai toleransi muncul dengan jumlah 3 kali.

Penekanan buku teks Sejarah Indonesia pada pentingnya nilai pendidikan multikultural tidak lepas dari kebijakan pemerintah. Pemerintah membuat kebijakan kurikulum untuk mengatur isi materi dalam buku teks yang harus memenuhi syarat kelayakan BNSP (Badan Standar Nasional Pendidikan), KI (Kompetensi Inti), KD (Kompetensi Dasar), dan cakupan ruang lingkup materi yang disajikan dalam buku teks terdapat dalam kurikulum. Sehingga

penulisan buku teks tersirat nilai pendidikan multikultural di dalamnya tidak terlepas dari kepentingan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Nilai pendidikan multikultural dapat dipelajari salah satunya bisa melalui buku teks. Akan tetapi, kunci keberhasilannya terletak pada seorang pendidik yang mampu menanamkan pendidikan multikultural pada peserta didik. Sebab penanaman pendidikan multikultural tidak bisa hanya sekedar dijelaskan saja, tetapi harus dilakukan dengan tindakan secara langsung. Pendidikan multikultural dapat menumbuhkan sikap toleran, simpatik, dan empatik. Peserta didik juga berpartisipasi mempraktekkan nilai pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Dari setiap peristiwa atau kisah yang dituliskan dalam buku teks berdasarkan hasil analisis kritis dengan menggunakan teori Norman Fairclough, dapat diketahui bahwa setiap penggalan teks terdapat makna yang tersirat nilai pendidikan multikultural.

Daftar Rujukan

- Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fairclough, N. (1992). Discourse and text: Linguistic and intertextual analysis within discourse analysis. *Discourse & society*, 3(2), 193-217.
- Fauzan, U. (2014). Analisis Wacana Kritis dari Model Fairclough hingga Mills. *Jurnal Pendidikan*, 6(1), 1-15.
- Masitoh, M. (2020). Pendekatan dalam Analisis Wacana Kritis. *Edukasi Lingua Sastra*, 18(1), 66-76.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.
- Mulyana, A. (2017). *Multikulturalisme dalam Buku Teks Pelajaran Sejarah SMA suatu kajian Historiografi dalam Kapita Selekta (Pendidikan) Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Mumpuni, A. (2018). *Integrasi Nilai Karakter dalam Buku Pelajaran: Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013*. Yogyakarta: Deepublish.
- Napitupulu, E. L. (2013). Kurikulum 2013 Memperkuat Pendidikan Multikultural. Kompas.com. <https://edukasi.kompas.com/read/2013/03/10/11184141/kurikulum.2013.memperkuat.pendidikan.multikultural>
- Poerwandari, E. K. (2011). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Rosada, A., & Albertus, D. K. (2019). Pendidikan Multikultural: Strategi Mengelola Keberagaman di Sekolah. PT Kanisius.
- Setiawati, E., & Rusmawati, R. (2019). *Analisis Wacana: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Malang: UB Press.
- Slamet, S. (2017). Penanaman Nilai-Nilai Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah: Sebuah Pemersatu Pluralitas Bangsa. *PAWIYATAN*, 24(2), 17-28.
- Supriatin, A., & Nasution, A. R. (2017). Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praktik Pendidikan di Indonesia. *Elementary*, 3(1), 1-13.
- Suryana, Y., & Rusdiana, H. A. (2019). *Pendidikan Multikultural: Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa, Konsep Pinsip Implementasi*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Syahriman, A., & Mulyana, A. 2021. Multikulturalisme: Analisis Wacana Buku Teks Pelajaran Sejarah. *JAZIRAH: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan*, 2(1), 17-31.
- Winata, K. A. (2020). Implementasi Pendidikan Multikultural di Era Revolusi 4.0: Implementasi Pendidikan Multikultural di Era Revolusi 4.0. *Southeast Asian Journal of Islamic Education Management*, 1(2), 118-129.